

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan serta implikasinya terhadap tingkat kemiskinan di 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2020–2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan perempuan justru membuat mereka cenderung menunda masuk ke pasar kerja (misalnya karena memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau menunggu ketersediaan pekerjaan formal yang sesuai dengan kualifikasi). Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) ditolak.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan peran strategis dan keterlibatan perempuan di ruang ekonomi maupun pengambilan keputusan politik secara langsung membuka jalan dan peluang bagi perempuan lain untuk turut berpartisipasi aktif dalam pasar tenaga kerja. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) diterima.
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, investasi pada pembangunan manusia, khususnya dalam upaya menutup kesenjangan pendidikan dan kesehatan antara laki-laki dan perempuan, terbukti sangat efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima.
4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa perluasan peran perempuan sebagai tenaga profesional, parlemen, dan pengambil keputusan secara empiris mampu menekan tingkat kerentanan ekonomi keluarga di wilayah penelitian. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) diterima.
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan

6. Fenomena struktural di mana masuknya perempuan ke pasar kerja di wilayah penelitian lebih didominasi oleh sektor informal atau pekerja tidak dibayar secara layak. Peningkatan partisipasi ini merupakan bentuk strategi bertahan hidup (survival strategy) akibat himpitan ekonomi, bukan wujud pemberdayaan ekonomi (empowerment). Oleh karena itu, peningkatan TPAK justru berjalan beriringan dengan naiknya angka kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis kelima (H_5) ditolak.
7. TPAK perempuan tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara IPG terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan pengujian formal Uji Sobel, penurunan angka kemiskinan terbukti lebih kuat didorong oleh pengaruh langsung dari Pembangunan Gender (IPG) tanpa harus melalui perantara partisipasi angkatan kerja secara kuantitas. Dengan demikian, hipotesis keenam (H_6) ditolak.
8. TPAK perempuan tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara IDG terhadap tingkat kemiskinan. Pengujian Sobel mengonfirmasi bahwa efektivitas pengentasan kemiskinan terjadi murni karena dampak langsung dari Pemberdayaan Gender (IDG) itu sendiri di sektor publik. Dengan demikian, hipotesis ketujuh (H_7) ditolak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan lebih efektif dicapai melalui pendekatan langsung berupa peningkatan kualitas kapabilitas dasar dan pemberdayaan strategis perempuan (IPG dan IDG). Sebaliknya, sekadar mendorong peningkatan kuantitas angka partisipasi kerja perempuan (TPAK) tanpa diiringi penciptaan lapangan kerja sektor formal yang berkualitas justru mencerminkan kondisi kerentanan ekonomi masyarakat.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah di 13 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan harus

merancang program intervensi yang memfasilitasi transisi tenaga kerja perempuan dari sektor informal ke sektor formal. Karena masuknya perempuan ke pasar kerja saat ini lebih didorong oleh motif *survival strategy*, Dinas Tenaga Kerja perlu menyediakan program pelatihan vokasi tersertifikasi dan memberikan insentif fiskal atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang memenuhi kuota pekerja perempuan. Selain itu, pemerintah perlu memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi perempuan pelaku UMKM untuk meningkatkan skala usaha dan kemandirian ekonomi mereka.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

DPRD dan instansi terkait harus merumuskan regulasi daerah yang menjamin perlindungan kerja dan kesetaraan upah bagi perempuan, khususnya bagi mereka yang berada di kelompok pekerjaan rentan. Kebijakan afirmasi juga wajib diterapkan secara ketat untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam posisi manajerial dan pengambilan keputusan strategis baik di instansi pemerintahan maupun swasta mengingat peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terbukti secara empiris mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya perempuan usia produktif, perlu secara proaktif mengakses fasilitas peningkatan kapasitas diri seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau program sertifikasi kompetensi sebelum memasuki pasar kerja, sehingga tidak terjebak pada pekerjaan sektor informal berupah rendah. Kelompok perempuan di tingkat desa atau kecamatan juga perlu menginisiasi pembentukan koperasi atau komunitas wirausaha perempuan untuk memperkuat posisi tawar ekonomi dan jaring pengaman sosial rumah tangga.